

ISSN 2580 6378
E-ISSN 2580 7048



JURNAL
ASIA
PACIFIC
STUDIES

Journal of International Relations Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Kristen Indonesia

Volume 5 | Number 2 | July - December 2021

DAMPAK *BLUE ECONOMY* TERHADAP EKOSISTEM DI ASIA PASIFIK

Muhammad Andhika Pradana

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, RT. 9/RW. 6, Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, Indonesia.

Andhikapradana4@gmail.com

ABSTRACT

This research explains the effect of the blue economy on ecosystems in Asia Pacific, particularly the application of the blue economy model. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) is an economic cooperation forum for Asia Pacific countries which aims to improve welfare and economic growth with a competitive and sustainable marine and fisheries perspective for the welfare of society. To realize the vision of marine and fisheries development, a blue economy model is implemented. The method used in this research is to use qualitative research methods, qualitative research is a qualitative approach research method looking at multiple realities (compound), the results of construction in a holistic view. The accuracy of the researchers is very concerned in a qualitative study. Because this study does not use statistical measurements but rather the development of information from respondents and sources of research material, it is expected that the objectivity of the researchers will be more concerned so as not to affect the results of future research. Based on the research results show that the function of APEC is seen from its role to facilitate economic growth. Member countries with the achievement of the blue economy agreement are committed to forming partnerships that are more integrated, sustainable, inclusive and mutually beneficial. Apart from having the potential for fisheries commodities, Indonesia takes advantage of this opportunity to contribute to the implementation phase of the blue economy model in the fisheries industry sector.

Keywords: Blue Economy, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Sustainable Development, Industry, Ecosystems

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh *Blue Economy* terhadap Ekosistem di Asia Pasifik, khususnya penerapan model ekonomi biru. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan model *blue economy*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah sebuah metode penelitian pendekatan kualitatif melihat realitas ganda (majemuk), hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Ketelitian dari peneliti sangat diperhatikan dalam suatu penelitian kualitatif. Karena pada penelitian ini tidak menggunakan pengukuran secara statistik tetapi lebih ke pengembangan terhadap informasi dari responden dan sumber bahan penelitian, sehingga diharapkan objektivitas dari peneliti lebih diperhatikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian nantinya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi APEC dilihat dari perannya untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota dengan pencapaian kesepakatan ekonomi biru komitmen untuk membentuk kemitraan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, inklusif dan saling menguntungkan. Selain memiliki potensi komoditas perikanan, Indonesia memanfaatkan peluang tersebut untuk memberikan kontribusi dalam tahap implementasi model ekonomi biru di sektor industri perikanan.

Keywords: Blue Economy, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Pembangunan Berkelanjutan, Industri, Ekosistem.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengenal lebih dalam apa itu *blue economy* dan dampaknya di kawasan Asia Pasifik dan bagaimana bentuk penerapan model *blue economy* tersebut pada industri perikanan Indonesia. Forum kerjasama ekonomi terbuka Asia Pasifik yaitu, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dibentuk sebagai upaya untuk memajukan segala aspek kegiatan ekonomi di Asia Pasifik pada bulan November 1989 di Canberra-Australia. Dengan anggota sebanyak 21 negara. APEC merupakan forum kerjasama yang telah melakukan langkah besar dalam menggalang kerjasama ekonomi sehingga menjadi suatu forum konsultasi, dialog dan sebagai lembaga informal yang membangun kerjasama ekonomi yang berpedoman melalui pendekatan liberalisasi bersama berdasarkan sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif. APEC memberikan kerangka untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi anggotanya melalui prinsip-prinsip liberalisasi, fasilitasi perdagangan dan investasi (ASHIPNER 2020).

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga telah memiliki komitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model *blue economy* sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan dengan fokus pada *ocean based economy*. Sebagai salah satu forum kerjasama ekonomi yang bersifat multilateral, ini dapat dijadikan kesempatan untuk menjadikan APEC sebagai salah satu instrument pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan model *blue economy* untuk mewujudkan kerjasama kemitraan antar anggota APEC dalam bidang kelautan dan perikanan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga telah memiliki komitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model *blue economy* sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan dengan fokus pada *Ocean Based Economy*. Sebagai salah satu forum kerjasama ekonomi yang bersifat multilateral, ini merupakan kesempatan untuk menjadikan APEC sebagai salah satu instrument pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan model *Blue Economy* untuk mewujudkan kerjasama kemitraan antar anggota APEC dalam bidang kelautan dan perikanan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (Chen 2022, 87-89).

1.2. Rumusan Masalah :

Apa dampak *Blue Economy* terhadap terhadap Ekosistem di Asia Pasifik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Apa Itu *Blue Economy*.
2. Mengetahui dampak *Blue Economy* terhadap terhadap Ekosistem di Asia Pasifik

1.4. Tinjauan Pustaka

A. *Green Theory*

Politik hijau lahir dari kalangan akademisi yang prihatin dengan kondisi lingkungan yang semakin tereksplotasi akibat pembangunan yang kapitalistik. Teori hijau diilhami pemikiran ekologi global sebagai model pembangunan. Bertumpu pada Ekosentris atau menjadikan alam sebagai pusat kehidupan yang mendorong kepada interelasi antar individu. Atau bentuk emansipasi terhadap semua entitas yang sudah ada. Ekosentrisme

menekankan pada keseimbangan alam, bukan alam dijadikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia. Atau dalam kata lain manusia tidak bebas mendominasi.

Tujuan kehadiran teori Politik Hijau dalam HI adalah untuk memberikan penjelasan tentang krisis ekologi yang dihadapi umat manusia. Selanjutnya fokus pada upaya penyelesaian krisis tersebut dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai suatu hal yang perlu dijaga keseimbangannya. GPT juga hadir untuk memberikan dasar normatif bagi persoalan yang berurusan dengan permasalahan krisis ekologi tersebut (Patterson 2001). Politik hijau tumbuh seiring naiknya tren globalisasi dan industri ekstraktif yang semakin gencar. Yang mengakibatkan terganggunya keberagaman hayati, lapisan ozon yang menipis, dan perubahan iklim akibat lingkungan yang rusak. Meski belum ada teori terpadu tetapi teori hijau semakin berkembang mendekati penghujung abad 20 dan itu ditandai lahirnya banyak partai hijau di Eropa dan Tanzania. Argumen utama dari *green theory* adalah menyelamatkan bumi dari krisis ekologi dan menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi selanjutnya. *Green politics* memunculkan paradigma baru dalam struktur ekonomi-sosial-dan politik. Ekosentrisme yang bersifat etis memiliki beberapa ciri utama, Pertama, ekosentrisme mengidentifikasi semua masalah kepentingan manusia terhadap dunia bukan manusia (bertentangan dengan kepentingan ekonomi dalam penggunaan sumber daya). Kedua, mengidentifikasi masyarakat bukan-manusia. Ketiga, mengidentifikasi kepentingan generasi masa depan manusia dan bukan-manusia dan yang terakhir adalah menerapkan suatu perspektif holistik dan bukan atomistik, yaitu dengan menilai populasi, spesies, ekosistem dan lingkungan alam secara keseluruhan seperti halnya organisme individu (Burchill, dan Linklater : 1996, 339). Keempat, Green Politik Theory mempercayai adanya batas pertumbuhan (Dobson 1990: 15; Meadows et al. 1972). Green politik memandang ke arah ekologi global bukan ilusi pembangunan berkelanjutan. perjuangan ekologi diberbagai belahan dunia sudah marak terjadi dengan semakin menguatnya partai hijau yang diawali di Eropa. Gerakan ekologi mengupayakan terbangunnya kesadaran akan keberlangsungan ekologi, keadilan lingkungan, demokrasi grassroot, ekonomi berbasis komunitas, kesetaraan gender, dan desentralisasi. Derek Wall pemikir terkemuka Green politik asal inggris mendefinisikan empat pilar Green Politics sebagai berikut;

1. Ekologi
2. Keadilan sosial
3. Demokrasi akar rumput dan non kekerasan

Green theory mendorong untuk menghargai keberagaman baik manusia dan non manusia dan membangun kesadaran individu yang menjadi tanggung jawab bersama. Melihat struktur masyarakat yang timpang theory hijau turut menyuarakan kesetaraan gender. (Apriawan 2009)

Definisi terkait menurut UNRIC (*United Nations Regional Information Centre*), *Blue economy* merupakan sebuah penerapan dari *green theory* sebab dalam penerapan *blue economy* ditekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari laut dengan menjaga ekosistem dan tanpa merusak ekosistem kelautan (UNRIC 2022). APEC mengelurkan program *blue economy* agar pengelolaan sumber daya laut tidak merusak kondisi ekosistem laut yang dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi tetap tidak tercemar oleh berbagai metode eksploitasi yang digunakan oleh manusia, penerapan metode-metode ramah lingkungan yang diadopsi oleh para pelaku usaha dan bisnis sebagai mitra APEC dalam melaksanakan program *blue economy* mendorong para penggiat usaha dan *stakeholder* lain untuk melakukan cara eksploitasi yang lebih ramah lingkungan dan memungkinkan adanya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut. Program ini sejalan dengan kebijakan PBB dalam program SDG (*Sustainable development goals*) yang menekankan pentingnya pembangunan

berkelanjutan tanpa dan hasil dari pengelolaan ekonomi tersebut merata dan bersifat berkelanjutan. Program *blue economy* diperlukan mengingat dampak pemanasan global akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga dengan berjalannya program *blue economy*, maka ekosistem laut dapat terjaga dari kerusakan lingkungan lebih lanjut.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah sebuah metode penelitian pendekatan kualitatif melihat realitas ganda (majemuk), hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Ketelitian dari peneliti sangat diperhatikan dalam suatu penelitian kualitatif. Karena pada penelitian ini tidak menggunakan pengukuran secara statistik tetapi lebih ke pengembangan terhadap informasi dari responden dan sumber bahan penelitian, sehingga diharapkan objektivitas dari peneliti lebih diperhatikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian nantinya.

Menurut Sugiyono Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaan dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori (Sugiyono 2009).

2.1 *Blue Economy* di Asia-Pasifik

Dengan tercapainya kesepakatan kerjasama *blue economy* yang disepakati oleh 21 negara Asia Pasifik sebagai fokus utama kerjasama kemitraan antar negara anggota APEC, selain menunjukkan terwujudnya regionalisasi *blue economy*, juga menjadikan model ini sebagai integral pembangunan nasional anggota APEC. APEC menyepakati model *blue economy* sebagai fokus utama kerjasama kemitraan yang mencakup inovasi sektor perairan, energi dan pasokan pangan. Semua ini dituangkan dalam Deklarasi Xiamen yang disahkan pada pertemuan Tingkat Menteri Kelautan APEC keempat (*The 4th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting/AOMM4*) di Xiamen, Tiongkok pada 28 Agustus 2014 (APEC, *Blue Economy in APEC* 2013). Adapun komitmen APEC terkait *blue economy* adalah melakukan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap laut serta sumber daya kelautan, pengelolaan laut untuk ketahanan pangan, mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka, memerangi penangkapan dan perdagangan ikan ilegal dan memperbaiki manajemen penangkapan ikan, meningkatkan pengelolaan keberlanjutan dari ekosistem kelautan serta meningkatkan perdagangan produk ikan dan kelautan secara terbuka dan bebas. Melalui kesepakatan itu, setiap anggota APEC didorong untuk meningkatkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis ekosistem, pemanfaatan insentif ekonomi, dan instrumen berbasis pasar. Dalam tercapainya komitmen tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki komoditas perikanan yang potensial, memanfaatkan peluang itu untuk berkontribusi secara nyata dalam tahapan kebijakan dan implementasi model *blue economy* di sektor industri perikanan.

Tiga bidang kerjasama lainnya yang menjadi prioritas yakni *pertama*, konservasi ekosistem laut dan pesisir serta ketahanan terhadap bencana alam. *Kedua*, peran laut terhadap keamanan pangan dan perdagangan yang berhubungan dengan pangan, serta *ketiga* adalah terkait ilmu kelautan, teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, kerjasama *Blue Economy* di kawasan Asia-Pasifik dan menegaskan kembali dukungan kuat kami untuk mengambil tindakan dalam mempromosikan konektivitas dan komunikasi di antara anggota APEC untuk

memfasilitasi arus barang, jasa, perdagangan dan investasi. Selanjutnya melalui kesepakatan tersebut setiap anggota APEC didorong untuk meningkatkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis ekosistem, pemanfaatan insentif ekonomi dan instrumen berbasis pasar yang sesuai untuk menciptakan efisiensi dan memaksimalkan hasil ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan *Blue Economy* membutuhkan pemahaman yang baik tentang kelautan dan peningkatan kemampuan teknologi untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya kelautan melalui inovasi. Dalam pengembangan dan kerjasama *Blue Economy*, keterlibatan sektor swasta yang sesuai dengan pandangan dan prioritas APEC dinilai sangat penting. Anggota APEC didorong untuk menggali masukan dari sektor swasta termasuk usaha kecil dan menengah, seperti melalui dialog kebijakan dan kemitraan swasta publik. Selain itu, yang menjadi poin penting yang diatur dalam kesepakatan adalah mendorong anggota APEC untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan yang ramah lingkungan. *Blue Economy* dipilih sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, seperti energi laut terbarukan dan inovasi perikanan budidaya yang berkelanjutan (Ebarvia 2018).

Adapun prinsip-prinsip ekonomi biru adalah efisiensi alam dalam arti, ekonomi biru mencontoh pada alam (ekosistem), bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*). Kedua, Nir limbah (*zero waste*), limbah dari yang satu menjadi makanan/sumber energi bagi yang lain, sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal, bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrient dan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh pemegang kepentingan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya.

2.2. Dampak *Blue Economy* terhadap terhadap Ekosistem di Asia Pasifik

Di dalam prinsip-prinsip *blue economy*, kebijakan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara seimbang melalui diversifikasi kegiatan ekonomi sehingga mampu meningkatkan jumlah dan keragaman produk yang bernilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjamin perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. *Blue economy* merupakan model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan, menekankan pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut, dalam rangka meningkatkan secara menyeluruh taraf pemanfaatan sumber daya laut. *Blue economy* dapat dilihat sebagai kebijakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan). Atas dasar rancangan program dan urgensi terhadap perubahan iklim yang terjadi maka FAO (*Food and Agriculture Organization*) memfokuskan salah satu program lembaga tersebut terhadap perkembangan sistem perekonomian *blue economy* (FAO 2022). Program FAO terkait *blue economy* kemudian diangkat dalam berbagai forum kerjasama internasional, seperti pada pertemuan tingkat *Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* di Moskow pada bulan February 2012 (APEC 2013, 6-7).

Beberapa pertemuan lain dan forum internasional juga telah berperan krusial diberbagai dalam mengangkat isu *blue economy* di forum-forum penting, seperti APEC *Blue Economy Forum* di Tianjin, Cina pada awal 2012, *Blue Economy Forum 2012* yang dihadiri para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta, *Asia Conference on Ocean, Food*

Security and Blue Growth 2013 di Bali, *The First Blue Economy Summit* oleh SIDS yakni *Small Island Developing States*, 2013 di Abu Dhabi, the 8th *World Blue Economy Conference 2013* di Madrid, dan *The Global Ocean Action Summit 2014* di Den Haag, dan beberapa pertemuan internasional lainnya. Forum-forum tersebut telah mengantarkan bangsa-bangsa di dunia ke tingkat kesadaran yang makin tinggi mengenai kepedulian terhadap laut dan perlunya kerjasama internasional untuk melindungi laut dari kerusakan. Pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Paradigma pembangunan kelautan dengan mengadopsi konsep ekonomi biru diharapkan dapat membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut. Hal ini sejalan dengan pengendalian ancaman pemanasan global, seperti: energi gas buang dan karbon sehingga dapat terwujud pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan upaya pengentasan kemiskinan.

Hasil dari beberapa pertemuan tersebut kemudian di implementasikan khususnya terhadap negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik yang rentan mengalami dampak perubahan iklim. Aktivitas ekonomi berbasis keberlangsungan sumber daya dibutuhkan oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai Asia- Pasifik dengan bantuan dari FAO (*Food and Agriculture Organization*) merancang kebijakan untuk mendukung keberlangsungan sumber daya alam di negara-negara Asia-Pasifik yang semakin terancam dengan terjadinya perubahan iklim. Salah satu sumber penghasil yang signifikan dari negara-negara Asia-Pasifik bersumber dari sektor penangkapan ikan dan agrikultur. Sektor perikanan dapat mencakup sekitar 1% hingga 30% dari GDP negara di Asia-Pasifik, terkhusus negara kepulauan. Oleh sebab ketergantungan negara Asia-Pasifik dalam sektor budidaya kelautan dan agrikultur FAO merekomendasikan negara Asia-Pasifik dalam melaksanakan budidaya sumber daya berkelanjutan (*Fisheries and Agriculture Resources Use and Conservations Division 2014*, 3-6).

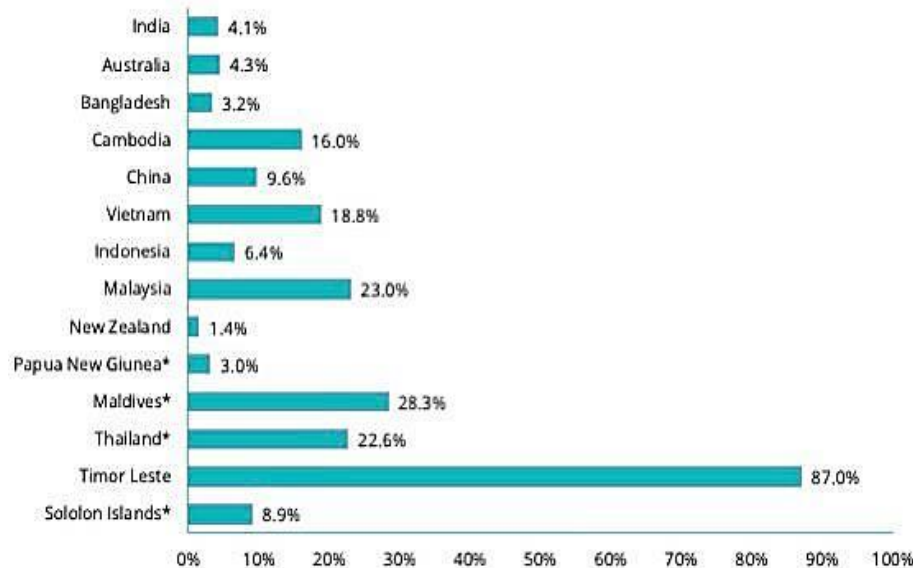
Bentuk dari implementasi *blue economy* oleh negara Asia-Pasifik dalam industri perikanan melalui inovasi dan kreatifitas adalah dengan menggunakan teknologi alat tangkap ikan yang efisien, efektif, ramah lingkungan, dan mampu menjamin kualitas ikan hasil tangkapan, pengembangan instalasi pendingin yang menggunakan tekanan air laut sebagai penggerak, instalasi produksi es balok/*ice cube* dengan bahan baku air laut, penggunaan *fish finder* yang dihubungkan dengan jaringan satelit yang dapat menghemat *route* pelayaran kapal ikan, penggunaan teknologi inovatif penyediaan benih unggul yang mengembangkan spesies baru, penggunaan teknologi budidaya yang berbasis *tropic level*, sirkulasi limbah keluaran yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri lainnya, pengolahan rumput laut terpadu, mulai sebagai bahan baku (turunan awal) hingga untuk berbagai produk turunan lainnya seperti: untuk produk farmasetika, bahan makanan, dan lain-lain. Selain itu, pengembangan usaha dan investasi dengan model *blue economy* diarahkan untuk mendorong berkembangnya usaha atau industri dan investasi inovatif dan kreatif yang mampu meningkatkan kinerja bisnis dan investasi yang secara ekonomi dan sosial lebih menguntungkan, namun tidak merusak lingkungan. Pertimbangan perlindungan lingkungan dimaksudkan untuk tidak menghambat atau menyebabkan pengeluaran ekstra namun sebaliknya, yaitu menggunakan sumber daya alam atau komoditas yang lebih efisien namun menghasilkan produk dan pendapatan yang lebih besar dan tanpa limbah. Dengan sistem ini, setiap unsur yang terkandung di dalam bahan baku dimanfaatkan untuk dijadikan produk-produk yang bernilai tambah hingga tidak menyisakan apapun berupa limbah (Mira 2014).

Pengembangan bisnis dan investasi dalam industri perikanan dengan model *blue economy* merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan sistem manajemen laut yang baik yaitu, laut yang lebih produktif dan sehat, dengan meningkatkan manfaat ekonomi sumber

daya kelautan, termasuk perikanan (*productive ocean*), sekaligus melindungi laut dari kerusakan, bahkan sehat (*healthy ocean*). Dengan model ini, pelaku bisnis dan investor dapat memanfaatkan setiap unsur yang ada pada bahan baku sebagai bahan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah. Dengan prinsip tersebut, keanekaragaman barang dan jasa dapat dihasilkan, sehingga memperbanyak kegiatan produktif dan mampu memperluas lapangan kerja (*ibid*).

Wilayah-wilayah kepulauan di kawasan Pasifik, Samudera Hindia dan Pantai Bengal sangat bergantung terhadap perkembangan kebijakan *blue economy* di kawasan Asia-Pasifik. Kebijakan yang ditempuh terkait *blue economy* berdampak signifikan baik secara ekologis dan ekonomi di wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis di kawasan Asia-Pasifik (Juneja 2021, 14-18). 21 negara yang tergabung dalam keanggotaan APEC menekankan pentingnya implementasi program *blue economy* dalam menjamin perekonomian berbasis kelautan yang berkelanjutan, langkah-langkah komperhensif yang dilakukan antara lain dengan penerapan kerjasama regional, bilateral maupun multilateral terkait penanganan sampah hasil industri perikanan melalui forum APEC *Virtual Working Group on Marine Debris* (VWGMD) dalam menjamin investasi industri perikanan dalam melakukan manajemen sampah yang dihasilkan dari industri perikanan (M. e. Juneja 2021, 31-32), salah satu fokus utama dari APEC VWGMD adalah dengan mengimplementasikan program pengelolaan sampah dari industri perikanan secara efisien dengan melakukan program daur ulang sampah maupun limbah hasil industri perikanan. Penerapan program APEC VWGMD turut mendorong berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta dalam melakukan *land waste management* dari industri perikanan seperti dengan program pengelolaan limbah ikan untuk diubah menjadi kolagen sebagai bahan baku kosmetik, gelatin sebagai bahan pangan, insang yang didaur ulang menjadi pupuk, minyak ikan sebagai *fish jelly* dan limbah cair dari ikan di daur ulang menjadi *fish protein concentrate* (APEC Ocean and Fisheries Group 2019, 40-45).

Penerapan *blue economy* berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan positif dari keberlangsungan hidup manusia dan pertumbuhan positif dari kualitas hidup dari masyarakat di kawasan Asia-Pasifik, perkembangan *blue economy* tercermin dari grafik yang disajikan dibawah ini;



Grafik 3.1. Grafik bagian sektor industri *blue economy* dari GDP negara-negara Asia-Pasifik (Sumber: *Contextualising Blue Economy in Asia-Pacific Region, The Blue Economy Framework*, Juneja., Mani., et. al, 17)

Mengingat pentingnya kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan *bread basket* dalam sektor ekonomi perikanan dunia, maka negara-negara di kawasan Asia-Pasifik menerapkan

sistem ekonomi terbarukan tersebut, penggunaan sistem budidaya perikanan yang terbarukan mendukung terhadap perkembangan industri perikanan di Asia-Pasifik yang sudah mencakup sekitar 34% dari industri perikanan global. Tantangan dari penerapan *blue economy* di kawasan Asia-Pasifik adalah penangkapan ikan yang tidak terkontrol dengan adanya sistem penangkapan konvensional dan berbasis mesin yang bersifat ilegal tidak dapat dikontrol oleh negara-negara Asia Pasifik yang dapat mengakibatkan penurunan dalam jumlah ikan yang hidup di kawasan Asia-Pasifik dan rusaknya habitat ikan laut di kawasan tersebut dapat mengakibatkan semakin berkurangnya ikan yang dapat di budidayakan di kawasan Asia-Pasifik dan lumpuhnya perekonomian agrikultur berbasis laut di kawasan Asia-Pasifik (M. e. Juneja 2021, 26-29).

Untuk dapat mengatasi bentuk dari kegiatan penangkapan ikan yang bersifat ilegal tersebut APEC sudah menerapkan program terkait penegakan hukum sebagai tindakan preventif atas terjadinya kegiatan penangkapan ikan ilegal yang melebihi jumlah kuota yang boleh dibudidayakan. Langkah yang ditempuh oleh APEC adalah melalui program yang bersifat "*soft power*" dan "*hard power*" melalui pengawasan lewat hukum internasional, protokol internasional dan pengawasan perusahaan swasta atas terjadinya kegiatan eksploitasi industri perikanan secara ilegal (Meere 2008, 8-11)

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara konseptual, prinsip dasar *blue economy* adalah *sustainability* atau berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini diartikan sebagai keadaan dimana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana yaitu secara ekologis berlanjut dan secara ekonomis menghasilkan manfaat. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga telah memiliki komitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model *blue economy* sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan dengan fokus pada *ocean based economy*. *Asia Pacific Economic Cooperation* yang merupakan salah satu forum kerjasama bidang ekonomi yang bersifat multilateral, ini dapat dijadikan APEC sebagai instrument pelaksanaan kesepakatan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan diantara negara anggota dengan model *blue economy*. APEC mendefinisikan *blue economy* sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, model ekonomi yang mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Pembangunan tersebut harus didasarkan pada keterpaduan geografis, keterpaduan ekologis, keterpaduan antar stakeholders, keterpaduan antar sektor, dan keterpaduan antar ilmu pengetahuan. Kelautan sebagai bidang yang terdiri dari multisektor, memerlukan sebuah kebijakan yang sinergis pada sektor ekonomi kelautan mengingat keterkaitan yang erat antar aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun diluar sektor, sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan. Dalam rangka menyusun keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan sehingga berkelanjutan, maka penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan. Gagasan *blue economy* merupakan suatu program yang bermanfaat baik demi keberlangsungan ekosistem bumi yang sehat, meningat dampak dari *global warming* dan perubahan iklim yang semakin lama berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Sehingga langkah-langkah yang sesuai dengan program pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kelangsungan kelayakan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Termasuk salah satunya penghuni ekosistem lautan dan agar para pelaku ekonomi melakukan eksploitasi yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan hidup. Dengan berbagai negara mengadopsi program *blue economy*, maka eksploitasi terhadap sumber daya kelautan antar negara menjadi lebih teratur dan dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan di

berbagai negara di dunia sehingga dampak buruk secara ekonomis terhadap sumber daya kelautan di negara-negara di dunia dapat di minimalisir dengan diterapkannya sistem *blue economy* dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- APEC Ocean and Fisheries Group. "Progress in achieving sustainable development in APEC." Dalam *APEC Marine Sustainable Development Report 2: Supporting Implementation of Sustainable Development Goal 14 and Related Goals in APEC*, oleh APEC Ocean and Fisheries Group, 40-45. Singapore: APEC, 2019.
- Eckersley, R. "Green Theory." Dalam *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, oleh Tim. Et al Dunne, 259. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Juneja, Mani., et.al. "Blue Economy in the context of resource security, R&D and SDGs." Dalam *Contextualising Blue Economy in Asia-Pacific Region, The Blue Economy Framework*, oleh Mani., et.al. Juneja, 26-29. Hong Kong: Konrad Adenauer Stiftung, 2021.
- Juneja, Mani., Et. al. "Contextualising Blue Economy in Asia-Pacific Region, The Blue Economy Framework." Dalam *Contextualising Blue Economy in Asia-Pacific Region, Exploring Pathways for a Regional Cooperation Framework*, oleh Mani., Et. al. Juneja, 14-18. Hong Kong: Konrad Adenauer Stiftung, 2021.
- Meere, Frank dan Lack, Mary. "IUU Fishing in the global context." Dalam *Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*, oleh Asia-Pacific Economic Cooperation Fisheries Working Group, 8-11. Singapore: APEC, 2008.
- Patterson, Matthew. "Green Politics." Dalam *Theories of International Relations*, oleh Scott. et al Burhill, 235-254. New York: Palgrave Macmillan, 2001.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif." Dalam *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, oleh Sugiyono, 15. Bandung: Alfabeta, 2009.

Jurnal

- Apriawan. "Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Multyversa*, 2009: 34-59.
- Chen, I-Ju. "A Critical Appraisal of Initiatives of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) For The Blue Economy: Deadlocks and Any Possible Way Out." *AJWH*, Vol 17:85, 2022: 87-89.
- Mira, Maulana Firdaus. "Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah." *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan*, 2014: 17-19.

Dokumen Daring

- APEC. "2nd APEC Blue Economy Forum, 6-7 December 2012, Tianjin, China." *mddb.apec.org*. 4 Februari 2013. http://mddb.apec.org/Documents/2013/SCE/SCE-COW-DIA/13_sce-cow_dia_010.pdf (diakses Januari 23, 2021).

- APEC. “Blue Economy in APEC.” *pecc.org*. 10 Desember 2013. <https://www.pecc.org/resources/next-generation/2126-gm-2014-beijing-new-generation-program-feng-jun/file> (diakses Desember 23, 2021).
- Ebarvia, Maria Corazon. “Blue Economy: Initiatives in the East Asian Seas.” *PEMSEA*. 3 Agustus 2018. https://www.unescap.org/sites/default/files/02_04_G_Blue_economy_PEMSEA_1-3Aug2018.pdf (diakses Januari 2021, 2021).
- FAO. “Asia and the Pacific's Blue Growth Initiative.” *FAO Regional Office For Asia and The Pacific*. 10 Agustus 2022. <https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/blue-growth/en/> (diakses Agustus 10, 2022).
- Fisheries and Agriculture Resources Use and Conservations Division. *Global Blue Growth Initiative and Small Island Developing States (SIDS)*. Yearly Report, Rome: FAO, 2014.

Website

- ASHIPNER. *Tujuan, Prinsip, dan Manfaat dari Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*. 24 Agustus 2020. <http://www.asiapacificpartnership.org/tujuan-prinsip-dan-manfaat-dari-asia-pasific-economic-cooperation-apec/> (diakses Januari 22, 2021).
- FAO. “Asia and the Pacific's Blue Growth Initiative.” *FAO Regional Office For Asia and The Pacific*. 10 Agustus 2022. <https://www.fao.org/asiapacific/perspectives/blue-growth/en/> (diakses Agustus 10, 2022).
- UNRIC. “Blue Economy: oceans as the next great economic frontier.” *United Nations*. 14 Maret 2022. <https://unric.org/en/blue-economy-oceans-as-the-next-great-economic-frontier/> (diakses Agustus 10, 2022).